Retorik • Vol. 8(1), 2020
DOI: 10.24071/ret.v8i1.4660

p-ISSN: 1412-6932
e-ISSN: 2549-2225

Berebut Makna Lewat *Dui' Menre'*: Analisis Mengenai Ideologi dalam Perkawinan Bugis

Arham Rahman
Galeri Lorong, Yogyakarta, Indonesia
E-mail: arham.rahman1@gmail.com

Abstract

The rite of *dui' menre'* bestowal in Bugis marriage positions women as object of exchange. However, this rite generates contradictory effect. On one hand, it is perceived as burdensome because the broom parties have to give a relatively big amount of money to the bride parties. On the other hand, the Bugenese keep running the rite. Hence, the rite of *dui' menre'* is not only a ritual of giving-and-taking money, but also an ideological conduct. There is something powerful that forces people to keep doing the rite solemnly. This research lead me to conduct this research. There are two objectives of the reserach. First, it tries to find the form of ideology and fantasy which support the rite of *dui' menre'* be towal; second, it wants to expose the Bugenese sub ject position in the face of *dui' menre'* bestowal. The fieldwork was conducted in Pinrang district, South Celebes.

To discuss the matter, this research utilizes Ideological Criticism and Sexuation developed by Slavoj Zizek from Lacanian concepts. Slavoj Zizek's Ideological Crit icism is used to find out the fantasy which supports an ideology. Meanwhile, sexuation is utilized to show the impossibility of sexual relation defined by Bugenese through *dui' menre'* r ite.

Dui' menre' is not only a language of tradition as it were in the era of traditional authority, but also a language of economy which makes woman as an object of exchange. *Dui' menre '* is a challenge that must be conquered by a man to get a woman. In the contemporary era, several forces collide. Bugis feudalism, Islam, and capitalism interweave in the same issue. In the rite of *ui' menre',* woman is reduced to be object cause of desire for man. In this symbolic realm the Bugenese subjects present and take position. Generally, there are several Bugis subject positions in responding *dui' menre',* namely psychosis, perve rse, obsess ive neurotic, and histeria.

Key Words: *dui' menre',* Bugis, ideological criticism, *sexuation.*

Tradisi pemberian hadiah atau seserahan dalam sebuah ritus perkawinan boleh dikata hampir selalu ada di berbagai komunitas masyarakat Nusantara. Dalam masyarakat Bugis, dikenal berbagai jenis seserahan yang mesti ada, yang diserahkan oleh kerabat mempelai laki-laki kepada mempelai kerabat perempuan. *Dui' menre'* merupakan satu dari dua jenis seserahan di luar mahar. Jenis lain yang ada dalam perkawinan Bugis disebut *lise' kawing* (hadiah perkawinan) [1]. Mahar diba-

1 Christian Pelras, "Manusia Bugis," dalam

gi menjadi tiga jenis: *sompa, sompa sara',* dan *sunrang*. *Sompa* dalam bahasa Indonesia berarti "persembahan" yang di masa lalu disimbolkan dengan uang *rella* (*rial*, mata uang Portugis sebelum Indonesia memperkenalkan mata uangnya sendiri, berlaku di Sulawesi Selatan). Adapun *sompa sara'* adalah mahar dalam Islam, sedangkan *sunrang* adalah 'mahar tanah' (sebidang tanah yang diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan). Besaran *sompa* yang diserahkan oleh mempelai laki-laki sangat bergantung pada status kebangsawanan perempuan [2].

Penelitian yang saya lakukan menyoroti persoalan *dui' menre'*, yang secara harafiah berarti 'uang belanja' (uang naik) yang nominalnya ditentukan oleh kerabat mempelai perempuan. Uang belanja ini diandaikan harus ada dalam ritus perkawinan Bugis yang digunakan untuk kepentingan pesta di kediaman mempelai perempuan. Setelah otoritas kekuasan tradisional Bugis meredup, posisi *dui' menre'* kian penting, menggantikan posisi *sompa* yang sebelumnya menjadi penanda status sosial perempuan. Semakin besar seserahan *dui' menre'*-nya, semakin tampak besar pula status sosial seseorang di mata masyarakat, tidak peduli orang itu seorang bangsawan atau bukan.

Membicarakan *dui' menre'* dalam ritus perkawinan Bugis bukan hanya menarik, melainkan juga perlu. Meskipun hanya menjadi bagian dari tradisi perkawinan Bugis, ritus pemberian *dui' menre'* mampu memberi makna sebuah hajatan perkawinan. Penilaian masyarakat terhadap sebuah perkawinan dan hubungan antara dua orang yang *sikalabbaine* (penyatuan dua insan dalam ikatan perkawinan) ditentukan oleh nominal seserahan *dui' menre'*. Di titik ini *dui' menre'* memang tampak bermasalah, tetapi yang lebih penting adalah mengapa orang mau terus menjalankannya.

Ritus pemberian *dui' menre'*, dengan demikian bersifat politis sekaligus ideologis. Ia tidak hanya menentukan bagaimana artinya penghajat perkawinan di mata masyarakat, tetapi juga mempunyai sifat yang 'memaksa'. Ritus *dui' menre'* adalah medan ideologis yang membuat orang tetap mau mengerjakannya meski tampak memberatkan. Untuk itu, dalam penelitian ini, saya menggunakan kritik ideologi Slavoj Zizek yang turut mengadopsi psikoanalisa Lacanian sebagai alat baca. Kepentingannya, menjawab pokok-pokok permasalahan yang saya kemukakan dalam penelitian ini: terkait ideologi yang ada dalam ritus ini dan posisi subjek Bugis di hadapan ritus ini.

Seperti yang disebut di atas, ritus pemberian *dui' menre'* dalam perkawinan Bugis dianggap sebagai sebu-

Ecole francaise d'Extreme-Orient (Forum Jakarta-Paris, Jakarta, 2006), 180.

2 Susan Bolyard Milliar, *Perkawinan Bugis* (Makasar, Sulawesi Selatan: Ininnawa, 2009), 37.

ah kewajiban yang mesti dijalankan. Ukuran manusia ditentukan dari besaran *dui' menre'*, baik oleh laki-laki sebagai pihak pemberi maupun perempuan sebagai pihak penerima. Sepasang kekasih yang hendak mengukuhkan hubungannya secara resmi (adat dan agama), mesti berhadapan dengan ritus *dui' menre'*. Ritus pemberian *dui' menre'* juga merupakan bahasa performatif orang Bugis untuk mendefinisikan hubungan antara laki-laki dan perempuan—dan dengan demikian, perbedaan status ontologis antara laki-laki dan perempuan secara seksual diandaikan eksis. Apakah itu berarti penelitian ini tidak lebih dari bentuk afirmasi terhadap asumsi khas narasi kosmologi pra-modern di berbagai belahan dunia yang membayangkan konflik purba antara prinsip maskulin dan feminin? Bukankah itu bertentangan dengan adagium Lacan yang paling bombastis (dan dibahas juga oleh Zizek)—"*there is no sexual relationship*"? Justru di titik itulah saya turut memancangkan penelitian ini.

Kritik ideologi Zizek mungkin bisa membedah modus operandi yang paling halus dari sebuah ideologi. Namun karena penelitian yang saya kerjakan adalah soal perkawinan dan melibatkan dua individu (yang kebetulan heteroseksual), saya membutuhkan perangkat lain, yaitu *sexuation*. Lewat *Sexuation*—dalam bahasa Zizek—Lacan telah melakukan re-ontologisasi terhadap ontologi tradisional maupun mitos sains modern perihal perbedaan seksual[3]. Sehingga, perbedaan seksual bukanlah dua entitas individu yang berbeda secara genetis (punya penis atau tidak), saling beroposisi (yin-yang, aktif-pasif, alfa-omega), atau "harmoni dalam konflik" *ala* Heraclitean, melainkan bagaimana laki-laki dan perempuan dibedakan hubungannya dalam bahasa (tatanan simbolik) atau lebih spesifik lagi, jenis *jouissance* yang bisa seseorang peroleh (lewat struktur maskulin atau feminin). Hubungan antara laki-laki dan perempuan, bila dihadirkan, hanyalah "samaran" atau usaha untuk menandai sebuah hubungan yang mustahil hadir.

Ideologi dalam Ritus Perkawinan Bugis

Ritus *dui' menre'* merupakan sesuatu yang menyejarah dan terkait dengan bagaimana orang Bugis memandang sebuah perkawinan. Perubahan situasi sosial, politik, dan ekonomi di setiap masa turut memberi pengaruh pada ritus tersebut. Di masa feodal atau saat otoritas tradisional masih berkuasa, perkawinan menjadi alat untuk merebut pengaruh dan menjaga kesetiaan kerajaan bawahan. Ritual perkawinan yang dihelat tidak lebih dari afirmasi terhadap otoritas tradisional atau apa yang disebut Zizek sebagai "*the mysti-*

3 Slavoj Žižek, *Less than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism*, [US and CA territories version] (London: Verso, 2012).

que of the institution" atau fungsi simbolik dari kekuasaan[4]. Karena itu juga, seserahan dalam perkawinan masyarakat Bugis pra-modern diatur secara hierarkis (berdasarkan *onro*: lokasi sosial).

Poin terpenting di masa pra-modern adalah destilasi pengetahuan, di mana masyarakat bekerja lewat ritual untuk menghasilkan pengetahuan yang terlembagkan, pengetahuan tentang bagaimana sebuah ritus perkawinan *semestinya* diselenggarakan. Pengetahuan tersebut tidak hanya menguraikan penanda utama atau penguasa tradisional, tetapi juga menghasilkan '*pure knowledge*' atau perempuan yang direduksi menjadi a (objek penyebab hasrat dalam teori Lacanian). Sebagai objek a, yang dilihat dari perempuan bukan eksistensinya secara fisik, tetapi apa dianggap ia wakili atau diandaikan hadir pada dirinya ketika hendak dipersunting seseorang: garis darah yang menandakan derajat sebuah jaringan kekerabatan di satu sisi dan legitimasi kekuasaan bangsawan di sisi yang berbeda (ilusi *dara takku'*: darah putih atau darah bangsawan).

Masuknya kolonialisme memang tidak memberi pengaruh langsung pada pergeseran ritual perkawinan. Hanya saja, di masa itu kategori ekonomi sudah mulai menjadi lebih penting dan memberi peluang bagi kalangan non-bangsawan (saudagar kaya) untuk unjuk gigi. Di masa itu, *dui' menre'* mulai mencuat dan konsep *mangelli dara* (membeli darah) telah diterapkan. *Mangelli dara* adalah seserahan tambahan yang diberikan oleh seorang laki-laki bukan bangsawan yang hendak menikahi seorang perempuan bangsawan. Namun, mencuatnya *dui' menre'* sebagai bahasa lain untuk menunjuk pada derajat seseorang dan *mangelli dara* sebagai jalan bagi saudagar kaya untuk mempersunting perempuan bangsawan juga adalah jebakan lain dari otoritas tradisional. Kalangan bukan bangsawan membutuhkan pengakuan, yakni sebagai bagian dari jaringan kekerabatan bangsawan tertentu, dan dengan demikian seolah-olah mengangkat status sosialnya.

Situasi itulah yang lantas ditolak oleh sejumlah kalangan, terutama masyarakat dari kelompok Islam puritan (yang menganggap tradisi sebagai tantangan bagi syariat Islam) yang merasa proses pernikahan diberatkan oleh ritus *dui' menre'*. Kelompok ini menyasar segala hak istimewa penguasa tradisional atau otoritas formal bangsawan, termasuk pewajiban *dui' menre'* yang dianggap terlalu tinggi. Di titik ini, masing-masing pihak mempunyai kekuatan pendukung. Di satu sisi, penguasa tradisional didukung oleh pihak Belanda yang ingin kembali berkuasa. Sedangkan di sisi lain, kaum puritan yang sudah berhadap-hadapan dengan tradisi feodal sejak pertama kali masuk

4 Slavoj Žižek, *For They Know Not What They Do: Enjoyment as a Political Factor* (London: Verso, 2008), 249.

berkolaborasi dengan kaum nasionalis. Berbagai kepentingan bersilang-sengkarut dan *dui' menre'* termasuk di dalamnya. Puncak pergolakan terjadi pada masa pemberontakan Kahar Muzakkar (1950-1965), di mana gugatannya bukan lagi terletak pada *omongan*, melainkan tubuh. Kelompok Kahar Muzakkar menyebar terror di kampung-kampung dan mengganggu sumber-sumber ekonomi kalangan bangsawan atau adat. Dalam istilah Lacanian, situasi ini disebut sebagai bentuk histeria. Sebagai wacana "revolusi", momen yang semestinya menjadi ruang untuk menggugat tradisi, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa karena yang dilakukan adalah langsung "membunuh sang raja". Gugatan terhadap *dui' menre'* hadir tetapi tidak ada kenikmatan pengganti yang dapat ditawarkan.

Simptom histeris kaum puritan menunjukkan kegagalan *dui' menre'* mendefinisikan hubungan antar-manusia di dalam perkawinan. Namun, keruntuhan kekuasaan formal otoritas tradisional tidak berarti menghilangkan ritus *dui' menre'*. Ritus *dui' menre'* tetap eksis karena ditopang oleh pengetahuan Tuan. *Sure'* (epos Bugis), *paseng* (petuah-petuah), *ade'* (adat) sampai pada doktrin-doktrin tak tertulis yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat perihal perkawinan adalah bentuk dari pengetahuan Tuan. Tuan boleh mati, tetapi tidak dengan nilai-nilainya. Makna perkawinan Bugis sudah dibentuk sejak otoritas tradisional masih berkuasa dan terus berkembang setelah keruntuhannya. Pengetahuan tradisional juga bukan satu-satunya yang menjadi penopang ritus *dui' menre'*, sebab pengetahuan modern akhirnya terlibat di dalamnya.

Siri' (rasa malu), menghormati perempuan, dan adat Bugis dijadikan sebagai dalih untuk mengantisipasi kesan bahwa *dui' menre'* tidak lebih dari sekadar transaksi. Dengan dalih itu, tawar-menawar *dui' menre'* dalam proses *mappattuada* (pelepas kata: semacam ritus peneguhan kesepakatan antar-keluarga calon mempelai) dan *mappasiarrekeng* (merekatkan: perekatan hubungan antar-kerabat kedua mempelai) seolah-olah diabaikan. *Dui' menre'* diyakini sebagai sarana untuk menghargai perempuan, padahal penghargaan itu bukan ditujukan kepada perempuan sebagai subjek, melainkan untuk menjaga gengsi sosial jaringan kekerabatannya. Dalam istilah Lacan, "perempuan disembunyikan", di mana dia sebagai objek a direduksi posisinya lewat bahasa gengsi sosial. Baik keluarga/kerabat pihak perempuan maupun keluarga/kerabat pihak laki-laki sama-sama menginginkan keuntungan darinya, keuntungan dengan menguraikan 'kehormatan perempuan'.

Rezim pengetahuan semacam itu menguasai struktur simbolik perkawinan dan menjadi kekuatan ideologis bagi sistem feodal-patriarki Bugis. *Dui' mere'* adalah bahasa tradisi sekali-

gus bahasa ekonomi yang menjadikan perempuan sebagai objek pertukaran. Di masa sekarang, berbagai kekuatan saling bertarung. Feodalisme Bugis, Islam, dan ideologi kapitalisme saling berkelindan dalam satu pusaran isu yang sama. Feodalisme Bugis mengandaikan ritus *dui' menre'* sebagai bagian integral dari identitas masyarakat Bugis, sehingga perlu tetap ada. Sedangkan ideologi Islam menganggap *dui' menre'* sekadar pemborosan dan mempersulit proses perkawinan. Adapun ideologi kapitalisme yang turut menentukan bentuk masyarakat Bugis saat ini, mereduksi hubungan sosial dalam perkawinan menjadi hubungan ekonomi, di mana kekuatan ekonomi menentukan posisi kita di dalam masyarakat.

Dari ketiga ideologi tersebut, feodalisme Bugis merupakan ideologi dominan yang menguasai ritus *dui' menre'*. Kehadiran kapitalisme di kemudian hari justru memperkuat feodalisme Bugis dengan logika ekonomi, memberi warna baru dalam sistem pengelompokan masyarakat Bugis: bukan lagi melulu status kebangsawanan, melainkan juga melalui kekuatan ekonomi. Kalangan terpelajar yang mengisi posisi pemerintahan (terutama sejak 1950-an) dan saudagar-saudagar kaya menjadi kelas-kelas baru dalam masyarakat Bugis. Mereka menjadi pengimbang bagi kelas yang sebelumnya dominan dan berkuasa, menggeser paradigma lama masyarakat yang selalu mengagungkan kaum bangsawan. Meskipun demikian, dalam kasus seperti perkawinan, kaum bangsawan tetap mempunyai posisi yang istimewa.

Secara umum, di bagian ini saya melihat perkawinan dan kekuasaan dalam masyarakat Bugis saling terkait satu sama lain. Perkawinan menjadi sarana untuk mengakses kekuasaan, tetapi risikonya menjadikan perempuan sebagai objek pertukaran. Otoritas tradisional dalam masyarakat Bugis mempunyai kekuasaan penuh karena fungsi simboliknya, mengonstitusikan ritus perkawinan berdasarkan hukum-hukum simbolik yang legal. Lewat narasi-narasi kebangsawanan, ritual perkawinan dihelat berdasarkan *onro* (posisi sosial) seseorang di dalam masyarakat.

Urgensi ritus *dui' menre'* di dalam perkawinan Bugis mencuat di masa kolonialisme, di mana kekuatan ekonomi menjadi kategori penting di dalam perkawinan. Meskipun begitu, kolonialisme tidak mengubah fungsi simbolik masyarakat sehingga ritus perkawinan, khususnya *dui' menre'* tetap berada dalam kontrol otoritas tradisional. Seperti pada ritus *mangelli dara* yang sekadar menjadi sarana bagi otoritas tradisional untuk memperkuat jaringan kekerabatannya.

Di masa-masa akhir kolonialisme, muncul gejolak dari kalangan non-bangsawan yang selama ini ditekan untuk melawan otoritas tradisional. Kaum-kaum puritan melancarkan

serangannya, menganggap *dui' menre'* terlalu tinggi dan cenderung memberatkan. Namun demikian, histeria kaum puritan ini tidak melahirkan solusi apa-apa bagi ritus pemberian *dui' menre'*. Kekuasaan tradisional memang berhasil diruntuhkan, tetapi tidak dengan pengetahuannya. Hingga kini, pengetahuan itulah yang menopang ritus *dui' menre'*, pengetahuan yang seolah-olah netral tetapi sebenarnya tidak otonom dan menjadikan *jouissance* (kenikmatan) mustahil diraih. Hasil dari wacana ini adalah subjek yang terbelah karena gagal mendapatkan kepuasan.

Posisi Subjek Bugis di Hadapan Ritus *Dui' Menre'*

Pada bagian ini, diuraikan soal posisi subjek Bugis di hadapan ritus *dui' menre'* beserta pihak- pihak yang mewajibkannya (masyarakat dan keluarga besar mempelai laki-laki maupun perempuan). Di hadapan Liyan, ada tiga posisi yang diambil oleh subjek Bugis: psikotik, perversi, dan neurotik. Subjek psikotik menolak Nama-Sang-Ayah dengan *silariang* (kawin lari). Ada dua alasan sehingga kasus psikotik muncul: pertama, dia tidak mau berhenti menjadi falus maternal 'ibunya', bahasa Islam. Kedua, Nama-Sang-Ayah terlalu kuat. Adapun subjek perversi atau *cynical*, menjadikan hukum sebagai objek penyebab hasratnya sehingga menjadikan ritus *dui' menre'* sebagai 'arena bermain' untuk mendapatkan *jouissance*. Subjek *cynical* melayani hasrat Liyan atau menjadi instrumen *jouissance* dari Liyan. Dalam kasus *dui' menre'*, ciri-ciri subjek *cynical* selalu mengedepankan bahasa hukum simbolik seperti *siri'*, gengsi keluarga, menghibur keluarga dan kerabat, menghormati perempuan, dan termasuk mereka yang melakukan tawar menawar *dui' menre'*. Subjek neurotik dalam ritus *dui' menre'* dikategorikan dalam dua bentuk: obsesional dan histeria. Subjek obsesif selalu mau menikmati *jouissance* Liyan dan mereduksi partnernya sebagai objek penyebab hasrat. Dalam kasus histeria, subjek perkawinan Bugis terjebak pada fungsi paternal sehingga menjadi *frigid*. Meskipun itu menjadi batas terjauh yang bisa dijangkau subjek Bugis sampai saat ini, subjek yang mengelabui Liyan agar mendapatkan *jouissance* bisa dilihat sebagai bentuk strategi. Lewat posisi itu, kita bisa melihat geliat lain yang dilakukan oleh subjek Bugis di hadapan Liyan. Di samping itu, dilihat dari geliat subjek, perempuan yang direduksi menjadi objek a sangat memungkinkan untuk menjadi analis, mendorong masyarakat untuk berefleksi perihal ritus yang selama ini dijalankan.

Paparan sebelumnya menunjukkan situasi yang dihadapi oleh subjek-subjek Bugis saat ini. Respons subjek pun bermacam-macam sesuai dengan apa yang diyakini benar. *Dui' menre'* bisa dibilang masih diperdebatkan. Sisi terjauh yang bisa dijangkau oleh

subjek yang diteliti adalah menggugat. Namun demikian, beberapa subjek mempunyai posisi dan sikap menarik dalam merespons *dui' menre'*. Dari kasus-kasus yang diteliti tersebut, tampak bahwa "tidak ada relasi seksual" dalam perkawinan Bugis. Perempuan justru direduksi menjadi objek a, melengkapi kepingan fantasi laki-laki. Masyarakat menciptakan nilai tukar bagi perempuan, mengandaikan perempuan sebagai sumber martabat atau kehormatan. Perempuan tidak hadir, hanya dihadirkan sebagai *choosen woman*.

Silariang sebagai karakter subjek psikotik tidak mengubah struktur simbolik perkawinan Bugis. Meski *silariang* tampak menarik atau seperti perlawanan nyata, *silariang* tidak mengajak orang untuk berefleksi tentang apa yang selama ini dilakoni dan dianggap sebagai kebenaran. Alih-alih berefleksi, *silariang* justru menghindar dari struktur simbolik. Begitu juga subjek *cynical* yang menikmati pewajiban *dui' menre'*, menjadikan *dui' menre'* sebagai 'arena bermain' untuk mendapatkan kepuasan. Subjek perversi memposisikan dirinya sebagai instrumen *jouissance* Liyan. Dengan memenuhi tuntutan adat, dia merasa berharga di hadapan masyarakat. Posisi subjek neurotik obsesional selalu merasa adat belum bisa digantikan. Subjek obsesional dalam penelitian ini merasa *dui' menre'* mempunyai celah-celah yang mereduksi hubungan antarmanusia, tetapi tidak ada sesuatu untuk mengisinya. Karena itu juga, orang obsesif tidak mencapai *jouissance*. Adapun subjek histeris (histeria feminin) justru memilih untuk "memainkan permainan laki-laki", menjadi *frigid*. Namun demikian, posisi inilah yang bisa dibilang menarik untuk dicermati.

Pengalaman dari subjek yang saya teliti, Ajap dan Iin serta Asratillah dan Ida, bisa dilihat sebagai bentuk paling jauh di mana subjek Bugis bisa memposisikan dirinya. Mereka mendapatkan *jouissance* dengan menyembunyikannya dari Liyan. Ajap dan Iin menyembunyikan *jouissance* yang diperoleh lewat bantuan langsung dari Iin agar *dui' menre'*-nya cukup, lalu bertindak seolah-olah bersusah payah mendapatkannya. Adapun Asratillah dan Ida melakukan 'pembohongan publik', menipu Liyan. Mereka berlagak seolah-olah ikut pada arus besar masyarakat, padahal sebaliknya, mereka diam-diam merengkuh *phallus*, meski akhirnya menjadi *frigid*.

Mencermati berbagai kasus yang muncul dan situasi yang berkembang sampai sejauh ini, ada beberapa poin yang mungkin bisa dilihat sekiranya ritus *dui' menre'* masih terus berlangsung di masa-masa mendatang. *Pertama*, pertarungan ideologi yang memungkinkan untuk saling berhadapan adalah kombinasi antara feodalisme dan kapitalisme melawan ideologi Islam. Kaum Islam puritan mempunyai jejak "perlawanan" di masa lalu dan memungkinkan untuk muncul kem-

bali. *Kedua*, sikap atau posisi subjek histeria berpotensi melahirkan gejala baru sebagai strategi berhadapan dengan Liyan. *Ketiga*, posisi perempuan yang direduksi sebagai objek a juga menunjukkan bahwa perempuan yang berkuasa, sebagai sumber nilai. Karena itu, perempuan bisa menjadi analis, berbicara pada subjek terbelah untuk melahirkan Tuan baru. Ketika perempuan sudah berbicara dalam posisinya sebagai analis, potensi untuk mengangkat objek–dalam bahasa Lacan–"*to the dignity of the thing*" [5] menjadi mungkin.

Posisi itulah yang barangkali bisa dibayangkan sebagai bentuk ideal. Ritus *dui' menre'* membuat perempuan berada di posisi subordinat, tidak berbicara untuk dirinya sendiri. Namun, posisi tersebut memungkinkan perempuan untuk membalik posisi. Manakala ia berbicara dalam posisinya sebagai analis, akan lahir budaya baru yang menggantikan tirani *dui' menre'* dalam perkawinan Bugis. Sejauh ini, penelitian yang saya lakukan belum sampai pada taraf itu. Selain belum menemukan kasus yang spesifik, boleh disebut bahwa terkait ritus *dui' menre'*, masyarakat Bugis masih berada pada level 'perdebatan'. Ada yang melanggengkan dan memandangnya sebagai kewajiban, ada juga yang berusaha menolak atau minimal menggelisahkan ritus tersebut. Meski demikian, setidaknya penelitian ini sudah berupaya melihat perkembangan terkini dari praktik ritus tersebut dan potensi pembalikan dari perempuan yang selama ini sekadar diposisikan sebagai objek a.

Daftar Pustaka

Kesel, Marc de. *Eros and Ethics: Reading Jacques Lacan's Seminar VII*. New York, AS: New York Press, 2001.

Milliar, Susan Bolyard. *Perkawinan Bugis*. Makasar, Sulawesi Selatan: Ininnawa, 2009.

Pelras, Christian. "Manusia Bugis." Dalam *Ecole francaise d'Extreme-Orient*. Jakarta, 2006.

Žižek, Slavoj. *For They Know Not What They Do: Enjoyment as a Political Factor*. London: Verso, 2008.

———. *Less than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism*. [US and CA territories version]. London: Verso, 2012.

5 Marc de Kesel, *Eros and Ethics: Reading Jacques Lacan's Seminar VII* (New York, AS: New York Press, 2001), 76.